



Analisis KR

Pertumbuhan dan UMKM

M Safar Nasir MSi

DALAM Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, 24 Mei 2021, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 ini akan tumbuh dalam kisaran 7,1% - 8,3%. Sedangkan keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi mungkin masih *modest* karena kuartal I sempat terkoreksi,

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Pertumbuhan

Sambungan hal 1

akibat Covid-19 meningkat. Sri Mulyani berharap kuartal III dan kuartal IV akan terakselerasi. Tentu saja proyeksi ini memberi harapan mulai terjadinya kebangkitan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penting (sekaligus merupakan harapan) yang perlu diajukan adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara kuantitas tersebut juga berkualitas?

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mempunyai sejumlah indikator. Namun yang utama khususnya di masa pandemi Covid-19 ini adalah sejauhmana pertumbuhan tersebut dapat membuka kesempatan kerja baru yang maksimal? Tentu termasuk penyerapan kembali pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19 ini. Sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. Sebab kita menyaksikan pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak usaha yang kolaps, atau menimbulkan PHK dan pengangguran yang tinggi. Selanjutnya menambah angka kemiskinan. Tentu ini merupakan masalah sosial ekonomi yang urgen diselesaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibanding-

kan Februari 2020 (catatan: belum ada pandemi) sebanyak 6,93 juta, maka ada peningkatan sebanyak 1,82 juta orang. Karena itu jika pertumbuhan ekonomi 7,1% - 8,3% nantinya tidak berdampak positif secara signifikan dalam mengatasi masalah kesempatan kerja (pengangguran dan kemiskinan), maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berkualitas. Atau terjadi apa yang disebut *paradox of growth* (paradoks pertumbuhan).

Idealnya, menurut standar International Labour Organization (ILO) setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 350.000 - 400.000 tenaga kerja. Kalau ini terjadi maka tentu pengangguran akan berkurang signifikan dan daya beli masyarakat meningkat atau kemiskinan berkurang.

Jika kita melihat di lapangan, salah satu sektor yang paling terdampak di masa pandemi ini adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan, sepanjang masa pandemi Covid-19 berlangsung, sektor UMKM rontok hingga 50%, dari 64,7 juta unit (2019) menjadi 34 juta unit (2020). Merosotnya jumlah UMKM ini otomatis berkontribusi menurunkan Pendapatan Domestik

Bruto (PDB) Indonesia (KR,27/3).

Sebagaimana kita ketahui bahwa UMKM merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data BPS jumlah UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha. Berkontribusi 60% lebih pada PDB nasional, serta lebih 90% tenaga kerja diserap oleh UMKM dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Dengan data tersebut jika kita ingin pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini berkualitas, harus mampu memulihkan dan atau menjadikan UMKM sebagai salah satu bagian/subjek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu untuk melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di masa pandemi Covid-19 ini salah satunya adalah dengan melihat seberapa besar jumlah UMKM yang kembali bangkit dan berjalan normal. Bila sebagian besar UMKM sudah mulai bangkit kembali dan berjalan normal bahkan bisa tumbuh, sesungguhnya masalah pengangguran dan kemiskinan sudah sebagian besar terselesaikan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi yang ada bisa dikatakan berkualitas.

(Penulis adalah Dosen FEB Universitas Ahmad Dahlan, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta 2020 -2023)-f